

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2020). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ervianto, W. I. (2019). *Manajemen Proyek Konstruksi* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.
- Hidayat, A. A. (2020). *Metode Penelitian Keperawatan dan Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi 2018). Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Nursalam. (2017). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Medika.
- Ompusunggu, A. (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Jakarta: Puspa Swara.
- Pohan, C. A. (2011). *Perencanaan Pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis* (Edisi Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Buku 1, Edisi 9). Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Buku 1, Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2009). *Perencanaan Pajak* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.

- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia* (Buku 1, Edisi 10). Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. (2005). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Alm, J. (1991). A perspective on the experimental analysis of taxpayer compliance. *Journal of Public Economics*, 44(3), 357–379.
- Arievani, B. P., & Susilawati. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak perusahaan konstruksi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 8(1), 15–28.
- Arievani, B. P., & Susilawati. (2026). Analisis tingkat kepatuhan PPh Pasal 21 pada perusahaan konstruksi berdasarkan skala usaha dan sistem internal. *Jurnal Riset Perpajakan*, 12(1), 45–58.
- Ermanuri, A., dkk. (2025). Kompleksitas administrasi perpajakan PPh Pasal 21 pada sektor jasa konstruksi berbasis proyek. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 101–114.
- Lengkong, G. V. C. (2024). *Tax review Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Dayana Cipta (Perusahaan Konstruksi)* [Skripsi Sarjana Terapan, Politeknik Negeri Manado]. Institutional Repository Politeknik Negeri Manado.

- Lestari, D., & Rahayu, S. (2023). Tantangan adaptasi sistem administrasi perpajakan modern bagi wajib pajak badan. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(2), 88–99.
- Nugraha, R., & Suryarini, T. (2021). Evaluasi kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 atas pekerja tidak tetap pada industri jasa konstruksi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 4(2), 112–125.
- Pangkey, M. F. Y., Warongan, J. D. L., & Wangkar, A. (2023). Analisis kepatuhan wajib pajak dalam penyeteroran dan pelaporan pajak. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(3), 789–800.
- Pratiwi, E., & Suhendro. (2022). Dampak pemahaman peraturan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 10(1), 34–45.
- Sari, D. P., & Hermawan, A. (2025). Kepatuhan pembayaran dan pelaporan PPh 21 berdasarkan regulasi terbaru. *Indonesian Journal of Social Science and Education*, 5(1), 22–33.
- Utami, N. K. A. (2024). *Analisis perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap dan tidak tetap* [Skripsi Tugas Akhir, Politeknik Negeri Bali]. Repository Politeknik Negeri Bali.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.